

PERAN PENDAPATAN DESA UNTUK BELANJA DESA DI KABUPATEN LAHAT

Rita Martini¹✉, Zulkifli Zulkifli², Sukmini Hartati³, Endah Widyastuti⁴

^{1,2,3,4} Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Jl. Sriwaja Negara, Palembang

✉e-mail: ritamartini@polsri.ac.id

Abstract

This study examines the effect of village income on village spending in the development sector. The data is sourced from the APBDes Realization Report in Lahat District from the Community and Village Empowerment Service. The analysis technique used is multiple linear regression analysis. The research resulted in PADes, DD, ADD and BHPR simultaneously affecting village spending. Partially, DD and ADD have a significant effect on village spending. Villages, the majority use transfer funds to be allocated to village expenditures. PADes does not allow it to be allocated to village expenditures because of its small amount. Overlapping central and regional regulations also makes it difficult for BHPR to be allocated for village expenditure.

Keywords: village financial management

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaruh pendapatan desa terhadap belanja desa bidang pembangunan. Data bersumber dari Laporan Realisasi APBDes di Kabupaten Lahat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Penelitian menghasilkan PADes, DD, ADD dan BHPR secara simultan berpengaruh terhadap belanja desa. Secara parsial, DD dan ADD berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. Mayoritas desa di Kabupaten Lahat menggunakan dana transfer untuk dialokasikan ke dalam belanja desa. PADes tidak memungkinkan untuk dialokasikan ke dalam belanja desa karena jumlahnya yang kecil. Tumpang tindihnya peraturan pusat dan daerah, juga mengakibatkan BHPR sulit untuk dialokasikan untuk belanja desa.

Kata kunci: manajemen keuangan desa

Pendahuluan

Belanja desa di bidang pembangunan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan [1]. Semakin besarnya alokasi belanja desa diharapkan mampu menekan angka kemiskinan sehingga angka kemiskinan akan menurun. Semakin besar pengeluaran anggaran dalam belanja pembangunan maka akan menurun angka kemiskinan [2] dan [3]. Hal ini sejalan dengan [4], makin besar

pendapatan desa maka akan semakin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa. Pelaksanaan pembangunan desa akan membutuhkan pembiayaan atau sumber-sumber penerimaan desa yang memadai. Pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa (PADes), transfer, dan pendapatan lain-lain desa.

Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak dan retribusi (BHPR) menjadi sumber pendapatan yang dominan dan memiliki proporsi besar di seluruh Kabupaten Provinsi Sumsel dibandingkan PADes. Kabupaten penerima realisasi DD

terbesar diantaranya Kabupaten Lahat Rp 272 miliar, OKI Rp 267 miliar, dan OKU Selatan Rp 233 miliar. Selain menjadi Kabupaten penerima realisasi transfer pusat berupa DD terbesar di Provinsi Sumsel, Kabupaten Lahat juga mendapat ADD dan BHPR terbesar ke 4 (tiga) dan 3 (tiga) di seluruh Kabupaten di Sumsel masing masing sebesar Rp 108 miliar dan Rp 4,2 miliar. Namun jumlah PADes Kabupaten Lahat hanya Rp 640 juta atau terendah ke 7 (tujuh) dari seluruh Kabupaten di Provinsi Sumsel [5]. Seluruh sumber pendapatan desa yang besar tersebut khususnya berupa transfer pemerintah pusat dan kabupaten/kota seharusnya difokuskan oleh pemerintah desa untuk pengembangan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Lahat yaitu masih tingginya angka kemiskinan jika dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Meskipun mengalami penurunan presentase dari tahun 2017, angka kemiskinan di Lahat masih relatif tinggi [6]. Kabupaten Lahat memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi ke 2 (dua) sebesar 16,81% pada tahun 2017. Selain itu, pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lahat masih relatif tinggi dibandingkan rata-rata jumlah penduduk miskin Sumsel sebesar 13,19%. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lahat yang relatif tinggi dan tidak mengalami penurunan signifikan, menunjukkan sumber pendapatan yang dialokasikan ke dalam belanja desa belum mampu menekan tingkat kemiskinan. Jumlah sumber pendapatan desa tersebut khususnya DD dan ADD seharusnya difokuskan untuk pengembangan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa diberi kewenangan untuk meningkatkan PADes sendiri tanpa

campur tangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah [7] dan [8]. Untuk mendukung tata kelola pendapatan desa yang baik salah satunya dipengaruhi oleh efektifitas pengendalian intern [9] dan [3].

Kajian terdahulu mengenai pengaruh pendapatan desa terhadap belanja desa [13] dan [14] membuktikan secara simultan PADes dan ADD berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. Hasil yang sama dikemukakan [15], PADes, DD dan ADD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. PADes, DD, ADD dan BHPR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan [10] dan [11]. Penelitian ini, menggabungkan variabel pendapatan desa yang terdiri dari PADes, DD, ADD dan BHPR, serta belanja desa khususnya di bidang pembangunan pada pemerintah desa Kabupaten Lahat.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal dengan metode kuantitatif. Peneliti menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel PADes, DD, ADD dan BHPR dan Belanja desa bidang pembangunan. PADes, DD, ADD dan BHPR merupakan variabel yang mempengaruhi, sedangkan belanja desa bidang pembangunan merupakan variabel yang dipengaruhi.

Populasi penelitian ini seluruh desa yang ada di Kabupaten Lahat terdiri dari 360 Desa dari 24 Kecamatan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan *purposive sampling*. Kriteria-kriteria meliputi: 1) Desa yang mengumpulkan LRA APBDes Tahun Anggaran 2018 di DPMD Kabupaten Lahat 2) LRA APBDes yang memiliki komponen DD, ADD dan BHPR namun tidak memiliki

PADes. Sampel yang diperoleh sebanyak 232 desa di Kabupaten Lahat.

Data dikumpulkan dengan metode kepustakaan. Data sekunder terdiri atas LRA APBDes Tahun 2018 yang diperoleh langsung dari pihak DPMD Kabupaten Lahat.

Model penelitian menggunakan regresi linier berganda merujuk pada [12], yaitu:

$$BDBP = a + \beta \text{ PADes} + \beta \text{ DD} + \beta \text{ ADD} + \beta \text{ BHPR} + e$$

Keterangan:

Y = Belanja desa bidang pembangunan (BDBP)

X1 = Pendapatan asli desa (PADes)

X2 = Dana desa (DD)

X3 = Alokasi dana desa (ADD)

X4 = Bagian hasil pajak dan retribusi (BHPR)

a = Konstanta Regresi

β = Koefisien regresi

e = Error

Hasil dan Pembahasan

Model regresi memenuhi asumsi normalitas, artinya data dalam penelitian ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Hasil uji multikolinieritas menunjukkan nilai *tolerance* keempat variabel lebih dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* kurang dari 10. Disimpulkan model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami permasalahan multikolinieritas. Uji heteroskedastisitas menghasilkan nilai signifikansi keempat variabel independen lebih dari 0,05. Tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Berdasarkan kriteria pengambilan uji keputusan berarti tidak terjadi autokorelasi.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan regresi:

$$BDBP = -951328828,93 + 0,272 \text{ PADes} + 0,578 \text{ DD} + 0,834 \text{ ADD} + -2,419 \text{ BHPR} + e$$

BHPR memiliki arah hubungan negatif terhadap belanja desa di bidang pembangunan. Sedangkan PADes, DD dan ADD memiliki arah hubungan yang positif terhadap belanja desa bidang pembangunan.

Uji statistik F menghasilkan F hitung > F tabel (12,826 > 2,411) dan nilai signifikansi (0,000 < 0,05) maka H1 diterima. PADes, DD, ADD dan BHPR secara simultan berpengaruh terhadap belanja desa bidang pembangunan. Berdasarkan hasil uji statistik t dapat diinterpretasikan: 1) PADes secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan; 2) DD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan; 3) ADD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan; dan 4) BHPR secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan.

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan pengaruh PADes, DD, ADD dan BHPR terhadap belanja desa bidang pembangunan sebesar 45,2%. Sisanya 54,8% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam model penelitian ini.

PADes tidak berpengaruh terhadap belanja desa bidang pembangunan, hasil ini sejalan dengan [11]. Kondisi tersebut disebabkan tidak memungkinkan bagi pemerintah desa untuk mengalokasikan PADes ke dalam belanja pembangunan desa. Desa-desa di Kabupaten Lahat cenderung memiliki jumlah PADes yang kecil dan seragam. Mayoritas desa masih bergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat maupun

kabupaten/kota berupa DD, ADD dan BHPR sebagai sumber pendapatan utama. Semakin rendah PADes yang diperoleh suatu desa, maka desa tidak dapat memenuhi seluruh belanja desanya yang akibatnya akan bergantung kepada pemerintah pusat [8] dan [3].

Terdapat pengaruh yang signifikan antara DD terhadap belanja desa bidang pembangunan [10], [11], [14] dan [15]. DD mempengaruhi alokasi belanja desa bidang pembangunan, karena Permendesa PDPTT No. 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan DD Tahun 2016, prioritas penggunaan DD diarahkan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa [17]. Penelitian ini tidak mendukung [18], DD tidak berpengaruh terhadap belanja desa bidang pembangunan. Pengalokasian DD oleh pemerintah pusat untuk tahun 2017 (PMK 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DD masih menggunakan rumus jumlah dana desa yang berasal dari alokasi dasar ditambah alokasi formula dimana alokasi dasar DD (sebesar 90%) berjumlah sama tiap desa.

Peraturan Bupati (PerBup) Lahat No. 4 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran dan Pengalokasian Bantuan Keuangan ADD menetapkan 2 (dua) jenis penggunaan ADD. Salah satu penggunaan ADD yaitu alokasi dasar, diberikan kepada setiap desa secara merata dalam kabupaten. Alokasi dasar dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa terdiri atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pembinaan masyarakat desa dan belanja tak terduga.

Sejalan dengan [4]; [10], (Irawan, Rahayu, & Aminah, 2018) dan (Dewi &

Irama, 2018), terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel ADD terhadap belanja desa bidang pembangunan. Penelitian ini tidak mendukung [10], [11] dan [19], peruntukan ADD sebagian besar untuk membiayai penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta operasional desa. Artinya ADD memang diprioritaskan bukan digunakan untuk belanja desa bidang pembangunan, sehingga kondisi tersebut mengindikasikan besaran ADD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja desa bidang pembangunan [19] dan [20].

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara BHPR terhadap belanja desa bidang pembangunan [10], dan [11]. UU No. 28 Tahun 2009 mengharuskan pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan hasil penerimaan pajak kabupaten paling sedikit 10% untuk desa di wilayahnya, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa serta penggunaan ditetapkan sepenuhnya oleh desa penerima. Terkait bagi hasil retribusi ditetapkan sebagian hasil penerimaan retribusi tertentu diperuntukan bagi desa dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan layanan seperti retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk (KTP) dan akta catatan sipil (ACS). Namun, Perbup Lahat No. 2 Tahun 2018 tentang Pengalokasian BHPR kepada desa Tahun Anggaran 2018 tidak diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan desa melainkan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.

Hasil penelitian ini mendukung [13] dan [14] yang membuktikan PADes dan ADD berpengaruh terhadap belanja desa. Hasil yang sama [10]; [11] dan [15] PADes, DD dan ADD secara simultan berpengaruh terhadap belanja desa bidang pembangunan. Semakin

tinggi PADES, DD, ADD dan BHPR maka belanja desa akan semakin meningkat. Semakin besar pendapatan desa maka akan semakin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa [4]. Pelaksanaan pembangunan desa membutuhkan pembiayaan atau sumber penerimaan desa yang memadai.

Kesimpulan

Secara parsial hanya DD dan ADD yang berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. Kondisi ini mengindikasikan belanja desa di bidang pembangunan diperoleh dari alokasi yang berasal dari DD dan ADD. Secara simultan PADES, DD, ADD, dan BHPR berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa di bidang pembangunan dengan nilai koefisien determinasi sebesar 45,20%.

Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan variabel dependen dan independen yang lebih spesifik supaya dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Disarankan juga untuk menambah jangka waktu dan objek penelitian guna meningkatkan keakuratan kualitas hasil penelitian.

REFERENSI

- I. Bastian, *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015.
- N. I. Susilowati, D. Susilowati and S. Hadi, "Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur," *Jurnal Ilmu Ekonomi*, vol. 1 , no. 4, pp. 514-526, 2017.
- R. Martini, S. Hartati, Z. Zulkifli and E. Widyastuti, "Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa," *Jurnal Akdemi Akuntansi*, vol. 2, no. 1, 2019.
- J. Hoesada, *Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)*, KSAP, 2016.
- R. Martini, K. R. Sari, T. Somadi, and I. W. Karman. "Financial Independence of the South Sumatra Regional Government" *Proceedings of the International Conference On Applied Science and Technology 2019 - Social Sciences Track (iCASTSS 2019)*. 354, pp. 360-364. Denpasar: Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/icastss-19.2019.75>, 2019.
- E. Amin, "BPS Lahat: Jumlah Penduduk Miskin di Lahat Tertinggi ke-2 di Sumatera Selatan," 7 November 2018. [online]. Available: <http://palembang.tribunnews.com/2018/11/07/bps-lahat-jumlah-penduduk-miskin-di-lahat-tertinggi-ke-2-di-sumatera-selatan>.
- A. A. Jiwangga and A. Prastyawan, "Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Kedungpring Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik," *Jurnal Mahasiswa Unesa*, vol. 3 , no. 1, pp. 1-8, 2016.
- A. M. Janah, "Analisis Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa terhadap Belanja Desa Tahun 2017 (Studi Empiris di Desa-Desa Se-

- Kabupaten Wonogiri)," *Publikasi Ilmiah*, 2018.
- R. Martini, K. R. Sari and R. S. Wardhani, "Analisis Penerapan Good University Governance Melalui Efektivitas Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasional," in *Simposium Nasional Akuntansi 18*, Medan, 2015.
- I. A. Pangestu, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur (Studi Empiris di Desa-Desa Se-Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016)," *Naskah Publikasi Ilmiah*, 2017.
- H. W. Pinilih, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur (Studi Pada Desa – Desa di Kabupaten Wonogiri)," *Naskah Publikasi Ilmiah*, 2018.
- D. Priyatno, *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*, Edisi Kesatu, Yogyakarta: Andi, 2012.
- L. Sulistiyoningtyas, "Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa di Kecamatan Baron," *Simki-Economic*, vol. 1, no. 3, pp. 11-14, 2017.
- R. S. Dewi and O. N. Irama, "Pengaruh Pendapatan Desa, dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa dan Kemiskinan," *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, vol. 5, no. 2, pp. 11-18, September 2018.
- M. A. S. Irawan, S. Rahayu and W. Aminah, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Perimbangan Desa terhadap Belanja Desa (Studi Kasus pada Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2017)," *Jurnal AKSARA PUBLIC*, vol. 2, no. 4, pp. 190-202, Desember 2018.
- A. and S., "Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol. 12, no. 1, pp. 29-41, Juni 2014.
- H. Purbasari, B. W. Wardana and I. A. Pangestu, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum dan Pertanian (Studi Empiris di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo)," *The 7th University Research Colloquium (URECOL) 2018 Stikes PKU Muhammadiyah Surakarta*, pp. 281-287, 2018.
- D. Puspawati, H. Purbasari, S. Lestari and K. Pratiwi, "Analisis Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Modal Desa di Kabupaten Wonogiri Tahun 2017," *The 8th University Research Colloquium 2018 Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, pp. 487-492, 2018.
- R. Fajri, E. Setyowati and Siswidiyanto, "Akuntabilitas Pemerintah Desa pada

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*., vol. 3, no. 7, pp. 1099-1104, 2017.

R. Martini, R. Agustin, Z. Zaliah, "Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan: dari Kontribusi Retribusi Pasar." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah* 5 (1): 58–71, 2019.